

Dr. Asep Sunandar, S.Pd., M.Ap.

MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI



Penerbitan & Percetakan

MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI

Dr. ASEP SUNANDAR, S.Pd, M.AP



Penerbit & Percetakan

Universitas Negeri Malang

Anggota IKAPI No. 059 / JTI / 89

Jl. Semarang 5 (Jl. Gombong 1) Malang, Kode Pos 65145

Kotak Pos 13, MLG /IKIP Telp. (0341) 562391, 551312

psw 453

Sunandar, Asep.

Manajemen Perguruan Tinggi – Oleh: Asep Sunandar.–Cet. I–
Universitas Negeri Malang, 2016.

viii, 136 hlm; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978.979.495.894.0

Manajemen Perguruan Tinggi
Asep Sunandar

Layout : Nia Windyaningrum

• Hak cipta yang dilindungi:

Undang-undang pada : Pengarang

Hak Penerbitan pada : Universitas Negeri Malang

Dicetak oleh : Universitas Negeri Malang

Dilarang mengutip atau memperbanyak dalam bentuk apapun
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

• **Universitas Negeri Malang**

Anggota IKAPI No. 059 / JTI / 89

Jl. Semarang 5 (Jl. Gombong 1) Malang, Kode Pos 65145

Kotak Pos 13, MLG /IKIP Telp. (0341) 562391, 551312 psw 453

• Cetakan I : 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya kita semua dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Shalawat dan salam tercurah untuk nabi pembawa cahaya kehidupan Muhammad SAW.

Buku dengan judul “Manajemen Perguruan Tinggi” merupakan hasil penelitian yang dilanjutkan dengan pembahasan analogikal, dilengkapi dengan berbagai sumber mutahir baik dari dalam maupun luar negeri. Pembahasan dilakukan mulai dari kajian secara teoritis hingga praktis kondisi pelaksanaan program pascasarjana di fakultas.

Secara umum kajian ini tidak bermaksud untuk membandingkan mana yang lebih baik diantara pelaksanaan pascasarjana terpusat di PPs dengan penyelenggaraan pascasarjana di fakultas. Namun tujuan utamanya adalah untuk menetapkan suatu model pengelolaan pascasarjana yang lebih mendorong peningkatan kualitas akademik pendidikan pascasarjana. Penulis melakukan kajian terhadap tiga perguruan tinggi yaitu Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Pendidikan Indonesia. Hasil kajian memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan pendidikan pascasarjana yang dilaksanakan di fakultas. Terdapat berbagai problematik serta solusi yang telah diambil oleh ketiga perguruan tinggi tersebut.

Temuan-temuan yang dibahas dalam buku ini diharapkan menjadi input bagi para pengambil kebijakan perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi yang berencana melaksanakan integrasi pascasarjana ke fakultas. Sehingga jalannya transisi dan implementasi manajemen integrasi menjadi lebih baik.

Penulis sangat menyadari tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Para pembaca bisa mengontak penulis melalui surel asep.sunandar.fip@um.ac.id. Penulis sangat berterimakasih kepada kajar AP Dr. Yusuf Sobri, S.Sos. M.Pd dan Sekjur Teguh Triwiyanto, M.Pd yang telah membantu penerbitan buku ini.

Malang, 2 September 2016

Penulis

Asep Sunandar

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I FILSAFAT PENDIDIKAN TINGGI	
A. Kajian Filsafat Kant dan Hegel tentang Pendidikan Tinggi	1
B. Kontektualisasi Pendidikan Tinggi	3
BAB II TANTANGAN GLOBAL PENDIDIKAN TINGGI	
A. Kontekstualisasi Tantangan Global PT	9
B. Reformasi Pendidikan Tinggi	10
BAB III OTONOMI PERGURUAN TINGGI	
A. Otonomi Pemerintahan	15
B. Otonomi Perguruan Tinggi	16
BAB IV MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN TINGGI	
A. Jaminan Kualitas Perguruan Tinggi	23
B. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	25
BAB V BUDAYA AKADEMIK PERGURUAN TINGGI	
A. Nilai- Nilai Keorganisasian	31
B. Budaya Akademik Perguruan Tinggi	33
BAB VI KNOWLEDGE MANAGEMENT DI PERGURUAN TINGGI	
A. <i>Knowledge Management</i> (KM)	37
B. Penerapan KM di Perguruan Tinggi	39
BAB VII IMPLEMENTASI TEORI GIDDENS DALAM PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI	
A. Teori Strukturasi	43
BAB VIII PENDIDIKAN PASCASARJANA	
Pendidikan Pascasarjana	51
BAB IX MANAJEMEN PASCASARJANA TERINTEGRASI	
A. Latar Belakang Dilaksanakannya Pascasarjana Terintegrasi	55

B.	Implementasi Otonomi Kampus dalam Konteks Pascasarjana Terintegrasi	59
C.	Sistem Manajemen Mutu Pascasarjana Terintegrasi di Fakultas	64
D.	Budaya Akademik Pascasarjana Terintegrasi di Fakultas ...	70

BAB X STUDI KASUS PENYELENGGARAAN PASCASARJANA TERINTEGRASI DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

A.	Kasus-Kasus Pengelolaan Pascasarjana di FIA UB	75
----	--	----

BAB XI STUDI KASUS PENYELENGGARAAN PASCASARJANA TERINTEGRASI DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

A.	Pola Pengelolaan Pascasarjana di FTI ITB	93
----	--	----

BAB XI STUDI KASUS PENYELENGGARAAN PASCASARJANA TERINTEGRASI DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

A.	Kasus-Kasus Pengelolaan Pascasarjana di FIP UPI	114
----	---	-----

Daftar Rujukan	131
----------------------	-----

BAB I

FILSAFAT PENDIDIKAN TINGGI

A. Kajian Filsafat Kant dan Hegel tentang Pendidikan Tinggi

Filsafat Kant berpijak pada pandangan empirisme dan idealisme, Kant pada dasarnya menerima kedua aliran tersebut dan mencoba menggabungkannya dalam memahami suatu fenomena. Menurut Kant (dalam Wattimena, 2009:1) "baik 'indra' maupun 'akal' sama-sama memainkan peranan dalam konsepsi kita mengenai dunia. Artinya Kant berpandangan bahwa untuk memahami suatu objek dapat dilakukan dengan indra (empirisme) dan akal (idealisme) secara bersamaan. Sehingga kedua pandangan tersebut dapat saling mengisi kelemahan masing-masing.

Pandangan Imanuel Kant terkait pendidikan tinggi didasarkan kepada tiga kritiknya yaitu.

Philosophical higher education lies in the relationship between the three Critiques. The first Critique misrecognises the relation between the conditions of the possibility of experience and the conditions of the possibility of objects of experience in and as subsumptive judgement. The second Critique, even more ambitiously, seeks to reveal the categorical imperative of the relation between will and its object as the condition of the possibility of freedom. The third Critique is Kant's higher education regarding the truth of these misrecognitions. Philosophy's higher education is to be found here in the structure of reflective judgements (Tubbs, N. 2004:1).

Kant memandang proses pendidikan tinggi didasarkan kepada tiga kritikan yang dikemukakannya, yaitu pertama kesalahpahaman tentang hubungan diantara pengalaman dan objek dari pengalaman, kedua mencoba menemukan kategori dari hubungan diantara objek sebagai kondisi yang memungkinkan kebebasan, ketiga pendidikan tinggi menurut Kant untuk menemukan kebenaran dari kesalahpahaman. Ketiga kritikan tersebut pada dasarnya sejalan dengan

BAB II

TANTANGAN GLOBAL PENDIDIKAN TINGGI

A. Kontekstualisasi Tantangan Global PT

Higher education reform (pembaruan pendidikan tinggi) telah menjadi tema bahasan utama kajian manajemen perguruan tinggi. Scott (2000:1) menyebutkan alasan perguruan tinggi melakukan perubahan karena kedepan perguruan tinggi akan menghadapi tantangan dimana perguruan tinggi harus menjadi lembaga yang sukses mengembangkan ilmu pengetahuan, industri dan reformasi birokrasi. Dalam penjelasan selanjutnya, Scott menyebutkan bahwa perguruan tinggi akan berperan sebagai *culmination of the system building, state sponsored, public education projects*. Peran dan tantangan tersebut membutuhkan adanya pembaharuan di perguruan tinggi dengan tujuan utama memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kemampuan.

Dalam kancah global terdapat beberapa situasi yang harus menjadi perhatian pengelola perguruan tinggi. Blight, Davis, dan Olsen (dalam Scott, 2000:106) menyebutkan istilah universitas 21 yaitu suatu perubahan dari universitas tradisional menjadi universitas global, dengan meningkatnya kompetisi dan perbedaan perguruan tinggi, universitas 21 memiliki fokus utama pada penelitian dan universitas internasional. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa persaingan pada tingkat pendidikan tinggi tidak hanya bersifat nasional melainkan internasional.

Poole (2003:151) menjelaskan bagaimana pembaharuan perguruan tinggi yang terjadi di Jepang yang dipengaruhi oleh adanya orientasi pasar (*Marketization*), peraturan (*deregulation*), liberalisasi (*liberalization*), perbedaan dan individualisme (*diversity and individualization*). Dalam konteks kawasan Asia Tenggara juga terdapat sebuah pernyataan yang menggerakkan perguruan tinggi untuk melakukan pembaruan, seperti yang tertuang dalam laporan UNESCO (2006:11).

BAB III

OTONOMI PERGURUAN TINGGI

A. Otonomi Pemerintahan

Semangat reformasi yang hingga saat ini masih bisa dirasakan adalah merebaknya kebijakan desentralisasi disegala bidang kehidupan. Dalam Sistem pemerintah dikenal istilah desentralisasi pemerintahan, dalam dunia bisnis dikenal cara bisnis waralaba atau (*franchise business*), di perguruan tinggi dikenal kebijakan otonomi perguruan tinggi. Semangat otonomi merupakan buah pergerakan mahasiswa 1998 yang mengusung konsep desentralisasi sebagai lawan dari kebijakan sentralisasi pemerintahan yang diterapkan rezim orde baru.

Secara kebahasaan otonomi berarti “pemerintahan sendiri, hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002:805). Dalam pandangan lain Ostwald dan Ballou (dalam Enders 2012:7) *autonomy refers to ‘auto’ (self) and ‘nomos’ (rule or law) and ‘autonomia’ refers to the right to self-government, e.g. to a state free to determine the rules and norms by which it wants to live*. Otonomi mengacu kepada diri dan aturan, dan otonomi juga mengacu kepada hak-hak pemerintah yang memberikan kebebasan dalam menetapkan peran dan norma yang ingin ditetapkan. Dalam konteks pendidikan tinggi, Sularso (2000:32) menjelaskan bahwa tujuan otonomi pendidikan tinggi adalah “menjadikan perguruan tinggi sebagai kekuatan moral (*moral force*) di dalam proses transformasi Bangsa Indonesia menjadi masyarakat sipil yang lebih demokratis” Berpijak dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa otonomi itu merupakan pendelegasian kewenangan dari pemerintah terhadap suatu lembaga untuk menentukan aturan dan norma yang dibutuhkan dalam rangka untuk mewujudkan tujuan lembaga tersebut. Otonomi perguruan tinggi mengisyaratkan bahwa perguruan tinggi lebih leluasa dalam membentuk moral generasi muda bangsa sehingga akan tercipta manusia Indonesia yang berpengetahuan dan bermoral.

BAB IV

MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Mutu atau juga disebut kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi, kualitas merupakan sebuah fungsi dari seleksi dan kontrol. Pengertian kualitas ada yang konvensional sampai dengan yang lebih strategis. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk seperti: performansi (*performance*), keandalan (*reliability*), mudah dalam penggunaan (*easy of use*), estetika (*esthetics*), dan sebagainya. Sedangkan definisi strategis adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (*meeting the needs of customers*) (Gaspersz, 2003:4).

Berpijak kepada berbagai dasar pengertian kualitas tersebut dapat dijelaskan kualitas berfokus pada pelanggan (*customer focused quality*). Dengan demikian produk-produk dirancang, diproduksi, serta pelayanan diberikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Secara esensial kualitas mengacu kepada segala sesuatu yang menentukan kepuasan pelanggan, maka suatu produk yang dihasilkan baru dapat dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dapat dimanfaatkan dengan baik, serta diproduksi (dihasilkan) dengan cara yang baik dan benar.

Kotler (2000:329-333) merumuskan delapan dimensi kualitas sebagai berikut: (1) Kinerja (*performance*): karakteristik operasi suatu produk utama, (2) Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (*feature*), (3) Keandalan (*reliability*): probabilitas suatu produk tidak berfungsi atau gagal, (4) Kesesuaian dengan spesifikasi (*conformance to specifications*), (5) Daya tahan (*durability*), (6) Kemampuan melayani (*serviceability*) (7) Estetika (*esthetic*): bagaimana suatu produk dipandang dirasakan dan didengarkan, dan (8) Ketepatan kualitas yang dipersepsikan (*perceived quality*). Pembagian dimensi tentang kualitas tersebut menunjukkan bahwa kualitas memiliki komponen yang beragam. Masyarakat memandang kualitas dari berbagai sudut, bergantung kepada latar belakang kebutuhan, cara berpikir dan kebutuhan yang ingin dipenuhi.

Semakin spesifik suatu produk dihasilkan dan jasa disajikan maka tingkat kualitasnya pun akan semakin tinggi. Sebut saja mobil super mewah Rolls-Royce

BUDAYA AKADEMIK PERGURUAN TINGGI

A. Nilai- Nilai Keorganisasian

Nilai dapat dimaknai sebagai sesuatu pandangan yang dianggap baik dan dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan proses pendidikan. Dalam sosiologi, nilai mengandung pengertian sebagai sesuatu yang baik, yang diinginkan, yang dicita-citakan dan dianggap penting oleh warga masyarakat (Efianingrum, 2002:32). Nilai menyatakan keyakinan-keyakinan dasar bahwa suatu perilaku secara pribadi atau sosial dapat diterima atau tidak. Nilai mengandung suatu unsur pertimbangan dalam arti nilai mengemban gagasan-gagasan seorang individu mengenai apa yang benar, baik atau diinginkan. Menurut Robbins (2001:131), nilai mempunyai baik atribut isi maupun intensitas. Atribut isi menekankan bahwa suatu modus perilaku dianggap penting, sementara atribut intensitas memfokuskan pada seberapa penting perilaku tersebut.

Dalam konteks sebuah organisasi Tosi etc. (2005:356) menyatakan bahwa nilai sebagai sesuatu yang asli yang ditetapkan oleh pendiri organisasi dan direfleksikan menjadi keyakinan dasar tentang apa yang harus dikerjakan, bagaimana seharusnya mengerjakan, siapa yang seharusnya melakukan, dan cara yang harus ditempuh anggota (*these values may have originated with the firm founder and reflect his or her fundamental beliefs about what should be done, how it should be done, who should do it, and they way that member are treated*). Nilai dianggap sebagai sesuatu yang fundamental, ditetapkan oleh pendiri organisasi dan mejadi pedoman dalam segala urusan yang berkenaan dengan organisasi. Gagasan ini menyiratkan bahwa nilai sebagai sesuatu yang mendasar, diperlukan orgaisasi dan berlangsung secara turun temurun.

O'Reilly (dalam Tosi etc. (2005:356-357) mendeskripsikan enam poin nilai yang akan terbentuk menjadi identitas budaya sebagai cara organisasi bergerak:

1. *Innovation and risk taking seeking ne opportunities, taking risk, experimenting, and being unconstrained by formal policies and practices.*

KNOWLEDGE MANAGEMENT DI PERGURUAN TINGGI

A. *Knowledge Management* (KM)

Manajemen adalah proses penataan (berbagai fungsi manajerial seperti merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, pengawasan, dan pembinaan) berbagai sumber daya (manusia, Fasilitas, dana, dan lingkungan) dalam mengupayakan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pencapaian tujuan tersebut akan efektif apabila dilakukan secara sinergi antara fungsi-fungsi manajemen dalam menata sumber daya yang ada. Manajemen diperguruan tinggi dapat dipahami sebagai upaya pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki dalam kerangka pencapaian tujuan suatu perguruan tinggi.

Penerapan konsep manajemen akan sangat bergantung kepada kondisi yang dihadapi organisasi. Dalam perkembangan ilmu manajemen disebutkan bahwa manajemen moderen adalah manajemen yang didasarkan atas kondisi dan situasi serta menggunakan kerangka system dalam pelaksanaannya (Nanang Fattah, 2000:1). Di abad moderen sekarang ini ilmu manajemen berkembang dengan pesat, manajemen modern tidak hanya diterapkan di dunia usaha melainkan diterapkan pula di lembaga pemerintah.

Penerapan ilmu manajemen dalam lembaga publik termasuk di perguruan tinggi dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja serta peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Perkembangan ilmu manajemen sangat dinamis, dimulai dengan teori manajemen klasik, teori manajemen behaviour hingga teori manajemen modern yang terdiri dari berbagai model. Salah satu teori manajemen modern yang saat ini sedang banyak dibicarakan dan diterapkan di perguruan tinggi adalah manajemen pengetahuan (*knowledge management*).

Persaingan kualitas diantara perguruan tinggi mensyaratkan dilakukannya manajemen perguruan tinggi yang akuntabel dan dapat mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki. Faktor lain yang mendorong penerapan manajemen

IMPLEMENTASI TEORI GIDDENS DALAM PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI

A. Teori Strukturasi

1. Pengertian Teori Strukturasi

Teori strukturasi Giddens merupakan jalan tengah dari pertentangan pandangan sosiologisme *ala* Durkheim dan kutub interpretativisme *ala* Weber. Pandangan Durkheim selanjutnya disebut sebagai paradigma fakta sosial (sebagai label lain sosiologisme) dan paradigma definisi sosial (sebagai label sosiologi interpretativisme) Faisal (1998). Kedua pandangan tersebut memiliki cara pandang dan analisis yang berlainan sehingga sosiologi tidak mampu memberikan pemaknaan tentang manusia dalam konteksnya sebagai makhluk sosial (Hidir dan Mahdi, 2008).

Pemikiran Giddens mencoba untuk menelusuri kesepahaman diantara dua cara pandang sosilog sebelumnya, Giddens mengemukakan gagasan dualitas bukan dualisme. Dualitas dipahami sebagai penggabungan antara satu pandangan dengan pandangan lainnya sedangkan dualisme merupakan perbedaan antara satu pandangan dengan pandangan lainnya. Semisal antara subjektivitas dengan objektivitas, apabila dipandang sebagai dualisme maka kedua pandangan tersebut dipertentangkan namun apabila dipandang sebagai dualitas maka kedua pandangan tersebut saling melengkapi. Titik yang ingin dikemukakan Giddens menurut penulis sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa untuk menyelesaikan konflik bukan perbedaan yang dipertajam namun persamaannya.

Dalam upaya untuk menjelaskan bagaimana sebuah struktur terbentuk, penulis mengutip pendapat Giddens (1984: 25) sendiri yang menyatakan.

Structure thus refers, in social analysis, to the structuring properties allowing 'the 'binding' of time-space in social systems, the properties which make it possible for discernibly similar social practices to exist across varying spans of time and space and which lend them 'systemic' form. To say that structure is a Virtual order' of transformative relations.

PENDIDIKAN PASCASARJANA

Program pascasarjana merupakan suatu layanan pendidikan tinggi yang disajikan bagi lulusan program sarjana, dalam program tersebut terdapat dua tingkat pendidikan yaitu magister dan doktor. Penyelenggaraan pendidikan tinggi mengacu kepada berbagai landasan, penulis mengidentifikasi paling tidak ada dua landasan yaitu landasan filosofis dan landasan yuridis. Landasan filosofis merupakan dasar logika yang dijadikan acuan dalam melaksanakan dan mengembangkan program pendidikan tinggi. Sementara itu landasan yuridis merupakan landasan yang mengacu kepada referensi perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Penyelenggaraan program pascasarjana dilaksanakan oleh suatu unit lembaga yang disebut Program Pascasarjana (PPs), namun disebagian perguruan tinggi menyebutnya Sekolah Pascasarjana (SPs). Penerapan kedua istilah tersebut dipengaruhi oleh status kelembagaan perguruan tinggi. perguruan tinggi yang sudah menyandang status PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum) pada umumnya menggunakan istilah SPs, namun perguruan tinggi yang bukan PTN BH menggunakan istilah PPs.

Penyelenggaraan pendidikan pascasajana tidak dilaksanakan secara sembarangan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu lembaga pendidikan tinggi. Rincian persyaratan tersebut tertuang dalam Kepmendiknas Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi dan SK No. 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi.

Program pendidikan pascasarjana terdiri dari dua tingkatan yaitu magister dan doktor. Untuk mengenal lebih jauh apa yang dimaksud program magister dan doktor, penulis mengutip penjelasan dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan doktor, penulis mengutip penjelasan dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 19 sebagai berikut.

MANAJEMEN PASCASARJANA TERINTEGRASI

A. Latar Belakang Dilaksanakannya Pascasarjana Terintegrasi

Kebijakan pascasarjana di fakultas pada dasarnya bukan hal baru dalam regulasi manajemen pendidikan tinggi, namun hal tersebut menjadi sulit dilaksanakan karena pada dekade 90an jumlah doktor dan guru besar masih sangat minim. Kondisi tersebut yang memaksa perguruan tinggi Indonesia belum bisa melaksanakan PP No. 60 Tahun 1999 terutama Pasal 50 terkait jurusan sebagai penyelenggara pendidikan pascasarjana.

Terhitung sejak tahun 2000 sampai dengan 2006 beberapa perguruan tinggi mendapat status baru sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN). Kebijakan ini merupakan penjawantahan dari PP No 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan PP No 61 Tahun 1999 tentang PT BHMN. Imbas dari diberlakukannya peraturan tersebut adalah semakin luasnya kewenangan kampus dalam mengelola lembaganya. Masyarakat perguruan tinggi mengenalnya sebagai perluasan otonomi kampus, kewenangan ini dioptimalkan oleh para pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan pembaharuan sistem manajemen perguruan tinggi masing-masing.

Hasil analisa penelitian menemukan beberapa hal yang menjadi latar belakang pelaksanaan kebijakan pascasarjana terintegrasi yaitu Penegakan proses pembelajaran antara S1,S2,S3 agar pembelajarannya lebih baik, Pendidikan itu terintegrasi ada S1, S2, hingga S3, Integrasi menghindari overlapping materi perkualihan diantara jenjang sarjana, magister dan doktor, *Resource* dimiliki oleh fakultas, fakultas pada umumnya punya riset sendiri pascasarjana belum tentu punya lab punya riset sendiri, jurusan-jurusan yang sudah matang S1, S2, S3 itu menjadi satu kesatuan utuh jadi terintegrasi pengelolaannya.

Perubahan peran lembaga pascasarjana terjadi di ketiga lokasi penelitian, hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan peran dan distribusi kewenangan dari PPs/SPs ke fakultas dan Prodi. Pada kasus pertama menunjukkan peran yang dilakukan PPs UB adalah melakukan standarisasi kegiatan akademik, melakukan

STUDI KASUS PENYELENGGARAAN PASCASARJANA TERINTEGRASI DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Universitas Brawijaya beralamat di Jalan Veteran Kota Malang Kode Pos 65145. Perguruan tinggi ini memiliki 12 fakultas dan 2 (dua) program pendidikan setara fakultas, dengan jumlah dosen 1.852 dan 138 orang diantaranya bergelar guru besar (www.ub.ac.id. 2013). Pengembangan kampus UB didasarkan kepada visi dan misi seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis UB tahun 2006-2011, sebagai berikut.

Visi UB adalah Menjadi universitas unggul yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UB, 2006).

Misi yang dikembangkan berdasarkan visi tersebut adalah

1. Membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran tentang keberadaan penciptaan alam oleh Tuhan YME dan sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai
2. Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atau professional yang berkualitas serta berkepribadian.
3. Melakukan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional (UB, 2006).

Universitas Brawijaya menetapkan visi untuk menjadi perguruan tinggi unggul dan berstandar internasional, untuk mencapai cita-cita tersebut maka pengelola perguruan tinggi melakukan berbagai inovasi baik yang sifatnya manajerial kelembagaan maupun pengembangan kualitas sumber daya manusia. UB menetapkan beberapa program unggulan yang diantaranya adalah *benchmarking* dan pengakuan internasional melalui penerimaan mahasiswa asing dan *double degree*, peningkatan kapasitas teknologi informasi untuk mendukung proses belajar-pengajar, peningkatan SDM berkualitas, peningkatan

STUDI KASUS PENYELENGGARAAN PASCASARJANA TERINTEGRASI DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Institut Teknologi Bandung beralamatkan di Jalan Ganesha No. 10 Bandung Kode Pos 40132 dengan laman www.itb.ac.id. ITB berdiri pada tahun 1920 dengan nama *De Technische Hoogesschool te Bandoeng*. ITB melalui perjalanan panjang seiring dengan masa penjajahan dan kemerdekaan yang dialami Bangsa Indonesia. Tahun 1920 hingga 1942 berada dalam naungan penjajah Belanda, dan pada 1 April 1944 berpindah tangan dalam naungan penjajah Jepang, nama *Technische Hoogesschool* sempat diganti menjadi *Bandung Kogyo Daigaku*. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, ITB masih tetap berada dalam cengkraman pihak asing yaitu NICA, 21 Juni 1946 mereka mendirikan *Universiteit van Indonesie*, sebagai warisan dari NICA maka ITB sempat menjadi salah satu bagian dari Universitas Indonesia. Hingga pada akhirnya tanggal 2 Maret 1959 kampus tersebut diresmikan oleh Presiden Soekarno dengan nama Institut Teknologi Bandung.

Tahun 2000 hingga tahun 2005 ITB menyandang status sebagai PT BHMN, dalam masa tersebut mereka mengembangkan visi *awareness and interest, desire, acceptance, action*. Seiring dengan ketetapan Mahkamah Konstitusi yang mencabut Undang-Undang No 9 Tahun 2009 tentang PT BHMN maka status ITB ikut berubah menjadi perguruan tinggi negeri. Dalam proses pengembangannya ITB menetapkan sebuah visi yaitu “menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia”. Untuk merealisasikan visi tersebut ITB menetapkan misi yang diataranya yaitu “menciptakan, berbagi dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kemanusiaan serta menghasilkan sumber daya insani yang unggul untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik”. Kutipan visi dan misi tersebut menerangkan bahwa ITB merupakan perguruan tinggi yang dikembangkan dengan wawasan global. ITB tidak hanya ingin besar di tingkat nasional namun turut serta dalam perubahan internasional.

STUDI KASUS PENYELENGGARAAN PASCASARJANA TERINTEGRASI DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia merupakan perguruan tinggi yang terletak di Bandung bagian utara, tepatnya berada Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung. Lokasi tersebut merupakan lereng Gunung Tangkuban Perahu, maka tidak heran udara disekitar kampus berhawa sejuk dan segar. UPI berdiri pada tanggal 20 Oktober 1954 di Bandung, diresmikan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran pada saat itu yaitu Mr. Muhammad Yamin. Pada masa awal pendiriannya UPI bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG), pendirian lembaga tersebut dilatarbelakangi kesadaran perlunya disiapkan tenaga pendidik untuk mendidik putra putri bangsa, untuk mengisi kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas. Pergerakan kebangsaan yang pada saat itu berkembang menuntut tersedianya manusia terdidik sehingga Bangsa Indonesia mampu mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang mampu mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat.

Empat tahun setelah pendirian PTPG pemerintah melalui Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 40718/S yang menyatakan "bahwa PTPG dapat berdiri sendiri menjadi perguruan tinggi atau perguruan tinggi dalam universitas", maka seiring dengan berdirinya Universitas Padjadjaran (UNPAD), pada tanggal 25 November 1958 PTPG diintegrasikan menjadi fakultas utama Universitas Padjadjaran dengan nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

Catatan sejarah mengemukakan bahwa lembaga pendidikan di Indonesia pada saat itu sempat mengalami kegaduhan, karena adanya dua lembaga penyelenggara pendidikan yaitu FKIP dan Institut Pendidikan Guru (IPG). Untuk menghilangkan dualisme tersebut, pada tanggal 1 Mei 1963 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 1963, yang melebur FKIP dan IPG menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP).

Status perguruan tinggi sebagai IKIP berlangsung cukup lama yaitu 36 tahun, sejalan dengan tuntutan reformasi dan semakin meningkatnya kebutuhan pendidikan tinggi pemerintah memberikan perluasan mandat bagi Lembaga

DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, S. 2009. *Manajemen Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Anam, F. 2012. *Manajemen E-Learning di Perguruan Tinggi: Studi Multikasus di Institut Teknologi Tugu Pahlawan Surabaya, Politeknik Elektronika Robotika Surabaya, dan Universitas Gita Patria Surabaya*. Disertasi tidak diterbitkan. Malang: Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang.
- Baban, C.F. 2004. *A Knowledge Management Approach in Higher Education*. Oradea: Faculty of Management and Technological Engineering University of Oradea.
- Baets, W. 2005. *Knowledge Management And Management Learning: Extending the Horizons of Knowledge-Based Management*. New York: Springer Science Business Media, Inc.
- Berg, B. L. 2004. *Qualitative Research Methode*. Boston: Pearson.
- Brown, R. 2004. *Quality Assurance in Higher Education The UK Experience Since 1992*. London: Routledge Falmer.
- Burhanuddin. 2013. *Participative management and its relationships with employee performance behavior: A study in the university sector in Malang Indonesia*. Disertasi tidak diterbitkan. Adelaide, South Australia: The University of Adelaide.
- Chen, S. H. 2012. The Establishment of a Quality Management System for The Higher Education Industry. Published online: 25 March 2011 © Springer Science+Business Media B.V. 2011. Melalui www.adelaide.au.edu diakses 2 Februari 2012.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2010. *Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan kebudayaan.
- Ditjen Dikti Surat Keputusan No. 2045/D/T/2007 tertanggal 25 Juli 2007 tentang Kriteria Penilaian Perguruan Tinggi.
- Direktorat Pendidikan Tinggi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Direktorat Pendidikan Tinggi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Direktorat Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Dirjen Dikti Depdiknas. 2004. Strategi Jangka Panjang Pendidikan tinggi 2003-2010 (HELTS). Jakarta:Depdiknas.
- Effendi, S. 2003. *Pengelolaan Perguruan Tinggi Menghadapi Tantangan Global*. MAKALAH Dipresentasikan pada Seminar Nasional Majelis Rektor Indonesia